|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bab** | **Ruang Lingkup Umum** | **Standar EITI 2019** |
| **Bab I**  **Pendahuluan** | * Latar Belakang * Tujuan Laporan Konstektual * Ruang Lingkup * Metodologi Proses Pelaporan * Pelaksanaan EITI di Indonesia |  |
| **Bab II**  **Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif** | Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba). Dan data dari Kementerian /Lembaga yang terkait serta kewenangannnya | 2.1 Legal Framework and fiscal regime |
| **Bab III**  **Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif** | Terkait kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif dengan pembagian sektor minyak dan gas bumi dan sektor mineral batubara. Adapun katagori informasi dibagi menjadi 2 yaitu: pertama proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri ekstraktif. | 2.2 Contract and license allocations  2.3 Register of licenses  2.4 Contracts  3.1 Exploration  3.2 Production  3.3 Exports |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bab** | **Ruang Lingkup Umum** | **Standar EITI 2019** |
| **Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara** | Informasi terdiri:   * Komposisi Realisasi Pendapatan Negara, * Penerimaan Perpajakan, * Penerimaan Bukan Pajak, * Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif, * Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat, * Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. | 4.1 Comprehensive disclosure of taxes and revenues  4.2 Sale of the state’s share of production or other revenues collected in kind  4.3 Infrastructure provisions and barter arrangements  4.4 Transportation Revenues  4.5 Transactions related to state-owned enterprises (SOEs)  4.6 Subnational Payments  4.7 Level of disaggregation  4.8 Data timeliness  4.9 Data quality and assurance  5.1 Distribution of extractive industry revenues  5.2 Subnational transfers  5.3 Revenue management and expenditures |
| **Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara** | Informasi terdiri:   * Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah * Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri * Ekstraktif * Holding BUMN * Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia | 2.6 State participation  4.5 Transactions related to state-owned enterprises (SOEs)  6.2 Quasi-fiscal expenditures |
| **Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** | Informasi yang terkandung dapat dibagi menjadi sosial dan lingkungan.   * Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di mana bidang-bidang di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan. * Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan reklamasi. | 6.1 Social and environmental expenditures by extractive companies  6.4 Environmental impact of extractive activities |
| **Bab VII Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional** | Berisi penjelasan untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di industri ekstraktif yang sesuai dengan standard EITI dan flexible report, serta isu pada laporan ke delapan belum dibahas. Isu tersebut yaitu: pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19, commodity trading, dampak lingkungan, dampak terhadap masyarakat adat dan gender. | 6.3 The contribution of the extractive sector to the economy |
| **Bab VIII Kebijakan di Industri Ekstraktif** | Terkait reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk industri ekstraktif pada masing-masing berdasarkan rantai nilai (value chain). Informasi harus diungkap antara lain:   * Perkembangan integrasi teknologi informasi * Kebijakan sesuai value chain * Disclosure contract * Beneficial ownership | 2.5 Beneficial Ownership  7.2 Data accessibility and open data  7.3 Recommendation from EITI implementation |